

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITAS DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Chelsea Denisa^{1*}, Shahirah Nurza Illani², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴
^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:
18-05-2026

Disetujui:
19-05-2026

Dipublikasi:
01-06-2026

Kata Kunci:

*KIP Kuliah; Akses
Pendidikan; Implementasi
Kebijakan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas di Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta data penerimaan mahasiswa terkait implementasi program KIP Kuliah. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program KIP Kuliah berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan dukungan biaya hidup. Data Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026 menunjukkan bahwa dari 6.509 mahasiswa yang diterima di Universitas Negeri Surabaya, sebanyak 1.293 mahasiswa merupakan penerima Program KIP Kuliah. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan efektivitas penyebaran informasi, keterlambatan pencairan bantuan, potensi ketidaktepatan sasaran penerima, serta kompleksitas prosedur administrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi, penguatan sistem pengawasan dan verifikasi, serta penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengoptimalkan implementasi program dan mendorong akses pendidikan tinggi yang lebih merata.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas individu untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa penyelenggaraan wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya faktor kemiskinan yang membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi (Wanti et al., 2022). Kondisi ini mendorong pemerintah

untuk menghadirkan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bentuk intervensi kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Program KIP Kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA/ sederajat yang memiliki potensi akademik namun mengalami keterbatasan ekonomi. Program ini bertujuan untuk mengurangi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan tinggi, baik melalui pembiayaan pendidikan maupun dukungan biaya hidup. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 76 ayat (1), yang menegaskan bahwa pemerintah dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan akademik.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan dukungan pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi secara lebih adil. Fadhil & Sobic-El-Rayess (2021) menyatakan bahwa kebijakan bantuan pendidikan dapat memperluas kesempatan bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Sementara itu, Sariri dan Prabawati (2024) menemukan bahwa Program KIP Kuliah berkontribusi dalam mengurangi kendala ekonomi mahasiswa sehingga mendukung keberlangsungan studi mereka di perguruan tinggi.

Universitas Negeri Surabaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang mengimplementasikan Program KIP Kuliah. Dalam pelaksanaannya, universitas melakukan serangkaian tahapan seleksi, mulai dari verifikasi dokumen secara daring hingga survei lapangan untuk memastikan kelayakan calon penerima. Bagi calon mahasiswa yang berada di luar wilayah Jawa Timur, proses verifikasi dilakukan secara daring melalui video call sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan jarak dan biaya.

Meskipun demikian, implementasi Program KIP Kuliah di tingkat perguruan tinggi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah potensi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, yang dalam beberapa kasus diindikasikan melalui laporan atau pengamatan lingkungan sosial terhadap gaya hidup penerima. Selain itu, kompleksitas proses administrasi dan keterbatasan mekanisme pengawasan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program (Indrayani & Basri, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan praktik implementasinya di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, implementasi kebijakan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu program pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Program KIP Kuliah, khususnya di tingkat perguruan tinggi sebagai aktor implementasi. Analisis implementasi kebijakan diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program KIP Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas di Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas di Universitas Negeri Surabaya. Pendekatan ini dipilih untuk

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan (Moleong, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait, meliputi peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan Program KIP Kuliah, laporan lembaga terkait, data penerimaan mahasiswa, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan, sedangkan analisis dokumen digunakan untuk menelaah isi kebijakan dan praktik pelaksanaan Program KIP Kuliah di perguruan tinggi.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Program KIP Kuliah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data dan dokumen, pelaksanaan Program KIP Kuliah di Universitas Negeri Surabaya berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Implementasi program dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, penilaian kelayakan, hingga penetapan penerima bantuan.

Data penerimaan mahasiswa melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026 menunjukkan distribusi penerima Program KIP Kuliah sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Penerimaan Mahasiswa dan Penerimaan KIP Kuliah SNBP Tahun 2026

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total Pendaftar	53.237	100%
Mahasiswa Diterima	6.509	12,2%
Penerima KIP Kuliah	1.293	19,8%
Non Penerima KIP Kuliah	5.216	80,2%

Sumber: Universitas Negeri Surabaya (2026)

Berdasarkan Tabel 1, dari 6.509 mahasiswa yang diterima, sebanyak 1.293 mahasiswa merupakan penerima Program KIP Kuliah atau sekitar 19,8%. Proporsi ini menunjukkan bahwa program telah memberikan akses pendidikan tinggi bagi sebagian mahasiswa dari kelompok ekonomi kurang mampu. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah total mahasiswa yang diterima, cakupan program masih terbatas, sehingga menunjukkan adanya ruang untuk perluasan jangkauan penerima manfaat.

Analisis implementasi program dalam penelitian ini mengacu pada model George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Berdasarkan dokumen resmi dan penelitian terdahulu, informasi mengenai Program KIP Kuliah disampaikan melalui berbagai saluran, seperti situs resmi universitas, media sosial, dan kegiatan sosialisasi. Informasi tersebut mencakup persyaratan, prosedur pendaftaran, serta mekanisme verifikasi.

Namun demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi kendala, yang ditunjukkan oleh keterbatasan pemahaman sebagian calon mahasiswa terhadap prosedur administrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau dan dipahami oleh seluruh kelompok sasaran. Dalam perspektif Edwards III, aspek komunikasi yang tidak optimal dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber Daya

Program KIP Kuliah didukung oleh sumber daya berupa bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa. Komponen bantuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.**Komponen Bantuan Program KIP Kuliah**

Jenis Bantuan	Keterangan
Biaya Pendidikan	Ditanggung Penuh (UKT/SPP)
Biaya Hidup	Rp800.000 - Rp1.400.000 per Bulan
Sasaran	Mahasiswa Kurang Mampu
Tujuan	Meningkatkan Akses Pendidikan

Sumber: Kemendiktisaintek (2026)

Ketersediaan sumber daya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi. Namun demikian, berdasarkan temuan dari penelitian terdahulu, keterlambatan pencairan bantuan masih menjadi kendala dalam implementasi program. Kondisi ini berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi mahasiswa penerima, khususnya bagi mereka yang bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan akademik dan kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka Edwards III, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh ketepatan dan konsistensi dalam distribusinya.

Disposisi

Disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan program. Berdasarkan dokumen Admisi Universitas Negeri Surabaya, proses seleksi dilakukan melalui verifikasi dokumen dan survei kelayakan untuk memastikan bantuan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria ekonomi.

Proses ini menunjukkan adanya upaya pelaksana dalam menjaga ketepatan sasaran. Namun demikian, potensi ketidaktepatan tetap dapat terjadi, mengingat keterbatasan instrumen verifikasi dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program KIP Kuliah mencakup prosedur administratif dari tahap pendaftaran hingga penetapan penerima bantuan. Berdasarkan dokumen pelaksanaan program, sistem administrasi telah tersusun secara formal.

Meskipun demikian, kompleksitas prosedur masih menjadi kendala dalam implementasi program. Prosedur yang panjang berpotensi menyulitkan calon penerima dalam memenuhi persyaratan administratif. Dalam perspektif Edwards III, struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, implementasi Program KIP Kuliah di Universitas Negeri Surabaya telah memberikan kontribusi dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek komunikasi, distribusi sumber daya, ketepatan sasaran, dan penyederhanaan prosedur birokrasi yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan dokumen, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Negeri Surabaya telah berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Program ini berperan dalam mengurangi hambatan finansial melalui penyediaan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, sehingga mendukung keberlangsungan studi mahasiswa.

Analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun secara umum program telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, antara lain keterbatasan efektivitas penyampaian informasi, keterlambatan pencairan bantuan, potensi ketidaktepatan sasaran penerima, serta kompleksitas prosedur administrasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi program tidak hanya bergantung pada ketersediaan kebijakan dan sumber daya, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan di tingkat institusi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi, penguatan sistem pengawasan dan verifikasi, serta penyederhanaan prosedur birokrasi untuk memastikan program berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder berbasis dokumen, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data primer melalui wawancara atau observasi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program KIP Kuliah.

REFERENSI

- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadhil, I., & Sabic-El-Rayess, A. (2021). Providing Equity of Access to Higher Education in Indonesia: A Policy Evaluation. *Indonesian Journal on Learning and Advanced*, 3(1), 57-75. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v3i1.10376>
- Indrayani, I., & Basri, A. R. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 6(1), 97–103. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v6i1.889>
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2026). *KIP Kuliah*. Diakses dari <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012>
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 12(1), 238-251. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p238-251>
- Universitas Negeri Surabaya. (2026). *Hasil Seleksi SNBP 2026: UNESA Terima 6.509 Calon Mahasiswa Baru, 1.293 di Antaranya Penerima KIP Kuliah*. Diakses dari <https://de.unesa.ac.id/hasil-seleksi-snbp-2026-unesa-terima-6509-calon-mahasiswa-baru-1293-diantaranya-lolos-kip-kuliah>
- Wanti, M., Wesselink, R., Biemans, H., & Pj, B. d. (2022). Determining Factors of Access and Equity in Higher Education: A Systematic Review. *Equity in Education & Society*, 1(2), 279–296. <https://doi.org/10.1177/27526461221092>